

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN LAPANGAN & PEMBAHASAN**

#### **A. PAPARAN DATA**

##### **1. Paparan Data Hasil Wawancara**

###### **a. Budaya Patriarki Dalam Pendidikan Di Desa Pasarenan Kecamatan Kadungdung Kabupaten Sampang**

Pandangan masyarakat terhadap pendidikan bagi perempuan didasari oleh stereotip terhadap akses perempuan terhadap pendidikan. Halaweh menyatakan, “Perempuan tidak perlu berambisi untuk pendidikan.”<sup>1</sup>

Sedangkan Mahsus menyatakan, “Perempuan kodratnya hanya cukup melayani suami, anak dan memasak. Ada istilah yang lumrah untuk perempuan cukup di dapur, sumur, kasur.”<sup>2</sup>

Sependapat dengan Mahsus, Ning Maulatuz Zulfa menyatakan, “Pandangan bahwa perempuan tidak sama kewajibannya dengan laki-laki. Laki-laki sebagai pencari nafkah pendidikannya harus tinggi, sedangkan perempuan tidak perlu.”<sup>3</sup>

###### **b. Akses Pendidikan Perempuan Di Desa Pasarenan Kecamatan Kadungdung Kabupaten Sampang**

Keputusan tentang perempuan dalam aspek pendidikan dipengaruhi oleh budaya patriarki. Hal ini tercermin dari bagaimana sebuah keluarga memprioritaskan anak laki-lakinya untuk berpendidikan dibandingkan

---

<sup>1</sup> Halaweh, masyarakat, wawancara langsung 20 April 2024

<sup>2</sup> Mahsus, masyarakat, wawancara langsung 20 April 2024

<sup>3</sup> Ning Maulatuz Zulfa, tokoh masyarakat, wawancara langsung, 20 April 2024

perempuan. Halaweh menyatakan, “Dalam pendidikan, lebih diutamakan laki-laki untuk memiliki pendidikan lebih tinggi.”<sup>4</sup>

Sedangkan Mahsus menyatakan,

“Beban domestik yang harus perempuan tanggung lebih besar ditimbang laki-laki. Laki-laki sebagaipencari nafkaah, maka perlu memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibading perempuan yang kodratnya bukan mencari nafkah. Pendidikan untuk laki-laki bertujuan untuk mempermudah dalam mencari nafkah atau mengagkat finansial karena laki-laki tidak perlu memasak, mencuci, merawat anak dan sebagainya yang dilakukan perempuan.”<sup>5</sup>

Sependapat dengan Mahsus, Ning Maulatuz Zulfa menyatakan, “Perempuan hanya fokus urusan rumah atau domestik saja. Cukup laki-laki saja yang berpendidikan tinggi.”<sup>6</sup>

Pendidikan bagi perempuan masih menjadi hal tabu bagi kalangan masyarakat yang masih memegang teguh bahwa perempuan tidak berkewajiban mengenyam pendidikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Halaweh selaku masyarakat Desa Pasarenan yang menyatakan, “Perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan terlalu tinggi.”<sup>7</sup>

Sependapat dengan Halaweh, Mahsus menyatakan, “Perempuan tidak diwajibkan untuk sekolah sampai tingkat tinggi. Bisa memiliki pendidikan namun hingga umur yang cukup untuk dinikahkan. Kebanyakan lulus SMP atau MTS langsung menikah.”<sup>8</sup>

Ning Maulatuz Zulfa selaku tokoh masyarakat juga menyatakan, “Perempuan tidak perlu mengejar pendidikan terlalu tinggi, karena kodratnya hanya melahirkan, menyusui, merawat anak dan melayani suami.”<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Halaweh, masyarakat, wawancara langsung 20 April 2024

<sup>5</sup> Mahsus, masyarakat, wawancara langsung 20 April 2024

<sup>6</sup> Ning Maulatuz Zulfa , tokoh masyarakat, wawancara langsung, 20 April 2024

<sup>7</sup> Halaweh, masyarakat, wawancara langsung 20 April 2024

<sup>8</sup> Mahsus, masyarakat, wawancara langsung 20 April 2024

<sup>9</sup> Ning Maulatuz Zulfa , tokoh masyarakat, wawancara langsung, 20 April 2024

Pembatasan pendidikan bagi perempuan di Desa Pasarenan merupakan budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat dan merupakan norma adat. Halaweh menyatakan, “Budaya dari generasi sebelumnya, perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, ketika sudah sampai umur baligh maka dinikahkan.”<sup>10</sup>

Sedangkan Mahsus menyatakan, “Pembatasan pendidikan pada perempuan dibatasi oleh budaya yaitu keputusan orang tua dari generasi sebelumnya untuk menikahkan anak perempuan ketika usia baligh atau remaja.”<sup>11</sup>

Senada dengan pendapat tersebut, Ning Maulatuz Zulfa menyatakan, “Terdapat ketakutan masyarakat jika anak perempuannya tidak segera menikah sedini mungkin, mereka takut anaknya tidak laku. Sehingga secara turun temurun anak perempuan pada umumnya menikah dini.”<sup>12</sup>

Pembatasan pendidikan perempuan ditemui pada sampai mana perempuan mengenyam pendidikannya. Badrus Syamsih sebagai kepala desa Pasarenan menyatakan, “Tidak banyak yang tingkat pendidikannya sampai jenjang strata atau sarjana, paling minim adalah lulusan SD atau SMP, karena kebanyakan sudah dinikahkan begitu lulus sekolah.”<sup>13</sup>

Hal ini juga dikarenakan terdapat kesenjangan gender antarlaki-laki danperempuan. Badrus Syamsih selaku Kepala Desa Pasarenan menyatakan, “Di desa Pasarenan yang banyak berpendidikan dengan gelar sarjana bahkan lebih kebanyakan adalah laki-laki.”<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Halaweh, masyarakat, wawancara langsung 20 April 2024

<sup>11</sup> Mahsus, masyarakat, wawancara langsung 20 April 2024

<sup>12</sup> Ning Maulatuz Zulfa, tokoh masyarakat, wawancara langsung, 20 April 2024

<sup>13</sup> Badrus Syamsih, Kepala Desa, wawancara langsung 20 April 2024

<sup>14</sup> Badrus Syamsih, Kepala Desa, wawancara langsung 20 April 2024

Selain itu, terdapat faktor terbesar yang menjadi penghambat bagi perempuan dalam akses pendidikan. Badrus Syamsih menyatakan, “Pola pikir masyarakat tentang perempuan kodratnya fokus pada urusan domestic atau rumah bahkan dari generasi ke generasi perempuan dinikahkan secara dini karena takut tidak laku.”<sup>15</sup>

### **c. Upaya Dalam Mengatasi Fenomena Budaya Patriarki**

Pendidikan untuk saat ini telah dapat diakses bagi semua kalangan, tidak memandang gender baik laki-laki atau perempuan dapat mengenyam pendidikan. Sehingga dilakukan beberapa upaya untuk membuka jalan bagi perempuan. Upaya tersebut juga dilaksanakan di desa Pasarenan. Badrus Syamsih menyatakan, “Penyuluhan dengan mengadakan seminar kepada masyarakat terutama perempuan tentang pendidikan.”<sup>16</sup>

Upaya tersebut berhasil tidaknya dilihat dari bagaimana efektifitas atau dampak terhadap fenomena yang terjadi. Badrus Syamsih menyatakan, “Tidak terlalu efektif karena masih memegang teguh budaya dari generasi sebelumnya.”<sup>17</sup>

Dalam melakukan upaya tersebut terdapat tantangan tersendiri. Badrus Syamsih menyatakan, “Menghadapi berbagai komentar tentang pendidikan tidak terlalu penting untuk perempuan. Perempuan cukup di rumah fokus pada urusan anak dan suami serta keluarga. Karena anak perempuan adalah tanggung jawab orang tuanya.”<sup>18</sup>

## **2. Paparan Data Hasil Observasi**

---

<sup>15</sup> Badrus Syamsih, Kepala Desa, wawancara langsung 20 April 2024

<sup>16</sup> Badrus Syamsih, Kepala Desa, wawancara langsung 20 April 2024

<sup>17</sup> Badrus Syamsih, Kepala Desa, wawancara langsung 20 April 2024

<sup>18</sup> Badrus Syamsih, Kepala Desa, wawancara langsung 20 April 2024

Observasi yang peneliti temukan di desa Pasarenan adalah sebagian besar perempuan yang menjadi ibu rumah tangga. Peneliti mengamati bahwa perempuan tersebut tergolong ada pada usia muda atau belum mencapai batas umur yang dianjurkan pada usia matang untuk menikah. Hal ini didasarkan pada beberapa pertanyaan singkat yang peneliti ajukan mengenai pendidikan terakhir sebagian besar perempuan di Desa Pasarenan yang rata-rata pendidikan terakhirnya adalah SMP atau Mts sederajat meskipun ada beberapa sebagian yang pendidikan terakhirnya SD atau SMA. Selain itu, peneliti mengamati bagaimana keseharian sebuah rumah tangga, dimana di rumah perempuan fokus pada urusan domestik atau pekerjaan rumah dan mengurus anak serta suami dengan berbagai kebutuhannya, sedangkan laki-laki tidak ditemukan di rumah atau bekerja. Artinya secara kebiasaan perempuan memiliki beban domestik sedangkan laki-laki bekerja. Dalam hal ini, perempuan berada pada posisi sebagai istri atau ibu rumah tangga. Sehingga fenomena ini membuktikan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan yang berasal dari budaya pernikahan dini.

### 3. Paparan Data Dokumentasi

Berdasarkan data statistik pendidikan yang diperoleh peneliti dari kantor kelurahan Desa Pasarenan tentang pendidikan sebagai berikut:

a. Tingkat Angka Partisipasi Kasar (TAP) Pendidikan:

- 1) SD/MI: 92%
- 2) SMP/MTs: 85%
- 3) SMA/MA: 70%

b. Tingkat Angka Partisipasi Sejenis (APS) Pendidikan

- 1) SD/MI: 95%
- 2) SMP/MTs: 88%
- 3) SMA/MA: 75%

c. Tingkat Kelulusan

- 1) SD/MI: 90%
- 2) SMP/MTs: 80%
- 3) SMA/MA: 70%

Dari data persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, angka persentasenya semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Kemiskinan: Banyak keluarga di Desa Pasarenan masih hidup dalam kemiskinan, sehingga mereka kesulitan untuk menyekolahkan anak perempuan mereka.
- b. Diskriminasi gender: Masih ada stigma di masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan perempuan tidak penting pendidikan laki-laki.

- c. Pernikahan dini: Banyak anak perempuan di Desa Pasarenan dinikahkan pada usia dini, sehingga mereka putus sekolah.
- d. Ketersediaan fasilitas pendidikan: Fasilitas pendidikan di Desa Pasarenan masih terbatas, terutama untuk jenjang SMA/MA.

## B. TEMUAN LAPANGAN

### 1. Budaya Patriarki Di Desa Pasarenan Kecamatan Kadungdung Kabupaten Sampang

Beberapa pernyataan dari masyarakat menyatakan

- a. “Perempuan tidak perlu berambisi untuk pendidikan”
- b. “Perempuan kodratnya hanya cukup melayani suami, anak dan memasak.”
- c. Ada istilah yang lumrah untuk perempuan cukup di dapur, sumur, kasur.”
- d. “Pandangan bahwa perempuan tidak sama kewajibannya dengan laki-laki. Laki-laki sebagai pencari nafkah pendidikannya harus tinggi, sedangkan perempuan tidak perlu.”

Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa bentuk Budaya patriarki di desa Pasarenan adalah Perempuan dianggap tidak perlu berambisi untuk pendidikan tinggi karena kodratnya melayani suami, anak, dan mengurus rumah tangga. Pendidikan diprioritaskan untuk anak laki-laki karena mereka dianggap sebagai pencari nafkah. Hal ini menyebabkan kesenjangan gender dalam akses pendidikan, dengan lebih banyak laki-laki berpendidikan tinggi dibandingkan perempuan.

## **2. Akses Pendidikan Perempuan Di Desa Pasarenan Kecamatan Kadungdung Kabupaten Sampang**

Beberapa pernyataan masyarakat tentang akses pendidikan perempuan di Desa Pasarenan sebagai berikut:

- a. “Dalam pendidikan, lebih diutamakan laki-laki untuk memiliki pendidikan lebih tinggi.”
- b. “Beban domestik yang harus perempuan tanggung lebih besar dibanding laki-laki. Laki-laki sebagai pencari nafkah, maka perlu memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibanding perempuan yang kodratnya bukan mencari nafkah. Pendidikan untuk laki-laki bertujuan untuk mempermudah dalam mencari nafkah atau mengagkat finansial karena laki-laki tidak perlu memasak, mencuci, merawat anak dan sebagainya yang dilakukan perempuan.”
- c. “Perempuan hanya fokus urusan rumah atau domestik saja. Cukup laki-laki saja yang berpendidikan tinggi.”
- d. “Perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan terlalu tinggi.”
- e. “Perempuan tidak diwajibkan untuk sekolah sampai tingkat tinggi. Bisa memiliki pendidikan namun hingga umur yang cukup untuk dinikahkan. Kebanyakan lulus SMP atau MTS langsung menikah.”
- f. “Perempuan tidak perlu mengejar pendidikan terlalu tinggi, karena kodratnya hanya melahirkan, menyusui, merawat anak dan melayani suami.”
- g. “Budaya dari generasi sebelumnya, perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, ketika sudah sampai umur baligh maka dinikahkan.”

- h. “Pembatasan pendidikan pada perempuan dibatasi oleh budaya yaitu keputusan orang tua dari generasi sebelumnya untuk menikahkan anak perempuan ketika usia baligh atau remaja.”
- i. “Terdapat ketakutan masyarakat jika anak perempuannya tidak segera menikah sedini mungkin, mereka takut anaknya tidak laku. Sehingga secara turun temurun anak perempuan pada umumnya menikah dini.”
- j. “Tidak banyak yang tingkat pendidikannya sampai jenjang strata atau sarjana, paling minim adalah lulusan SD atau SMP, karena kebanyakan sudah dinikahkan begitu lulus sekolah.”
- k. “Di desa Pasarenan yang banyak berpendidikan dengan gelar sarjana bahkan lebih kebanyakan adalah laki-laki.”
- l. “Pola pikir masyarakat tentang perempuan kodratnya fokus pada urusan domestik atau rumah bahkan dari generasi ke generasi perempuan dinikahkan secara dini karena takut tidak laku.”

Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa akses perempuan dalam pendidikan tidak diprioritaskan. Keluarga lebih mengutamakan pendidikan tinggi untuk anak laki-laki dibandingkan perempuan. Perempuan dianggap memiliki beban domestik yang lebih besar sehingga pendidikannya dikesampingkan. Perempuan dianggap kodratnya bukan sebagai pencari nafkah sehingga pendidikannya tidak diutamakan.

Perempuan dianggap tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi. Cukup memiliki pendidikan hingga usia menikah, biasanya SMP atau MTS. Kodrat perempuan hanya melahirkan, menyusui, merawat anak, dan melayani suami.

Pembatasan pendidikan bagi perempuan merupakan budaya turun temurun yaitu Perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi dan dinikahkan setelah baligh. Orang tua menikahkan anak perempuan ketika usia baligh atau remaja. Takut anak perempuan tidak laku jika tidak menikah dini.

Mayoritas perempuan tidak mencapai jenjang strata atau sarjana. Pendidikan minimal adalah lulusan SD atau SMP. Perempuan diturunkan setelah lulus sekolah. Pria lebih banyak berpendidikan tinggi dibandingkan perempuan.

Faktor terbesar yang menghambat perempuan dalam mengakses pendidikan di Desa Pasarenan adalah pola pikir masyarakat yaitu Perempuan kodratnya fokus pada urusan rumah tangga. Perempuan dinikahkan secara dini karena takut tidak laku.

### **3. Upaya Dalam Mengatasi Fenomena Budaya Patriarki**

Beberapa pernyataan tentang upaya dalam menangani fenomena budaya patriarki di Desa Pasarenan sebagai berikut:

- a. “Penyuluhan dengan mengadakan seminar kepada masyarakat terutama perempuan tentang pendidikan.”
- b. “Tidak terlalu efektif karena masih memegang teguh budaya dari generasi sebelumnya.”
- c. “Menghadapi berbagai komentar tentang pendidikan tidak terlalu penting untuk perempuan. Perempuan cukup di rumah fokus pada urusan anak dan suami serta keluarga. Karena anak perempuan adalah tanggung jawab orang tuanya.

Upaya yang dilakukan untuk membuka jalan bagi perempuan di desa pasarenan yaitu dengan melaksanakan penyuluhan melalui seminar kepada

masyarakat, terutama perempuan, tentang pendidikan. Keberhasilan upaya tersebut tidak efektif untuk mengubah fenomena tersebut karena kentalnya budaya patriarki di masyarakat. Hal ini juga terlihat dari respon masyarakat yaitu komentar tentang pendidikan tidak terlalu penting untuk perempuan. Perempuan cukup di rumah fokus pada urusan anak dan suami serta keluarga. Karena anak perempuan adalah tanggung jawab orang tuanya.

### C. PEMBAHASAN

#### **1. Budaya Patriarki Di Desa Pasarenan Kecamatan Kadungdung Kabupaten Sampang**

Beberapa pernyataan tentang budaya patriarki di Desa Pasarenan sebagai berikut:

- a. “Perempuan tidak perlu berambisi untuk pendidikan”
- b. “Perempuan kodratnya hanya cukup melayani suami, anak dan memasak.”
- c. Ada istilah yang lumrah untuk perempuan cukup di dapur, sumur, kasur.”
- d. “Pandangan bahwa perempuan tidak sama kewajibannya dengan laki-laki. Laki-laki sebagai pencari nafkah pendidikannya harus tinggi, sedangkan perempuan tidak perlu.”

Salah satu bentuk budaya patriarki di desa Pasarenan yaitu perempuan yang tidak diizinkan untuk berambisi dalam mengejar pendidikan. Karena perempuan dianggap kodratnya hanya melakukan urusan rumah tangga. Pendidikan diprioritaskan hanya untuk laki-laki karena mereka sebagai pencari

nafkah. Hal ini menjadi salah satu penyebab adanya kesenjangan gender atau disebut dengan patriarki.

Sejak awal zaman, masyarakat patriarki terbentuknya masyarakat manusia yang berasumsi bahwa laki-laki mempunyai kewenangan lebih besar dibandingkan perempuan dalam urusan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Budaya patriarki ini telah lama menimbulkan perbedaan perilaku, status, dan kewenangan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.. Maskulinitas dalam budaya patriarki berfungsi sebagai norma utama dan pertanda bagi tatanan simbolis masyarakat. Budaya patriarki masih mengakar kuat dalam masyarakat, terutama dalam ranah domestik, ekonomi, politik, dan budaya, dan hal ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial.. Dengan cara ini, budaya patriarki telah menjadi dasar untuk sistem yang melibatkan penyebaran kewenangan, pengambilan keputusan, dan kepemilikan, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan berkeluarga. dimana suami merasa lebih berkuasa dan berada di atas istri Pada akhirnya, budaya seperti ini hanya akan menghasilkan diskriminasi, kesenjangan sosial, dan kekerasan terhadap perempuan.<sup>19</sup>

Sebagian besar masyarakat masih memiliki budaya patriarki, yang menunjukkan bahwa laki-laki tetap berkuasa. Seluruh masyarakat Indonesia menganut sistem patriarki, sehingga perempuan tidak dianggap lebih unggul dari laki-laki dan selalu menduduki posisi paling penting, superior dan dominan dalam masyarakat. Dalam kebudayaan, istilah “budaya patriarki” mengacu pada situasi sosial budaya di mana laki-laki menduduki posisi superior, berada di atas

---

<sup>19</sup> Putri Sanggita Padmayani, “Implikasi Budaya Patriarki Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, 48

perempuan, dan mendominasi perempuan. Pandangan paternalistik beranggapan bahwa kehadiran ayah atau laki-laki dalam sistem sosial menentukan struktur fungsional keluarga, dan inilah yang mendasari gagasan patriarki. Selama bertahun-tahun, budaya yang dikenal sebagai patriarki telah membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Sebagai kepala keluarga, laki-laki mengontrol sumber daya ekonomi dan peran seksual dalam keluarga. Akibatnya, laki-laki memiliki akses yang lebih baik terhadap sektor publik dibandingkan perempuan..<sup>20</sup>

Patriarki adalah sistem tata kekeluargaan yang memprioritaskan garis keturunan bapak. Dalam sistem sosial, ayah atau laki-laki memimpin seluruh anggota keluarga bahkan harta dan sumber ekonomi. Dalam sistem patriarki, perempuan harus dikuasai laki-laki bahkan dianggap sebagai harta laki-laki. Selain itu, dalam patriarki seorang bapak selaku pemimpin keluarga memiliki hak mutlak atas keluarganya, bahkan anak perempuan yang menikah juga menjadi hak milik suaminya.<sup>21</sup> Tatanan patriarki menyebabkan perempuan menjadi ter subordinasi dalam masyarakat, dikucilkan, dan bahkan dihadapkan pada ketidakadilan. Status dan peran sosial tidak lepas dari pengaruh identitas gender seseorang, laki-laki dan perempuan menempati peran dan posisi sosial yang berbeda dalam masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Harifudin Halim dkk, *Problem Sosial Budaya* (Yogyakarta: Nuta Media Yogyakarta, 2021), 77

<sup>21</sup> Anita Kusnul Khotimah, "Perlawanan Kaum Perempuan Terhadap Patriarki Dalam Film", Skripsi, Universitas Negeri Sebelas, Surakarta, 2010, 21

<sup>22</sup> Riska Mutiah, "Sistem Patriarki Dan Kekerasan Atas Perempuan", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, Uin Mataram 2019, 58

Sementara itu, terdapat banyak kelompok masyarakat yang menunjukkan bahwa masing-masing kelompok tetap menganut budaya patriarki sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Keluarga

Keluarga merupakan kelompok terkecil dan terdekat dalam masyarakat. Namun keluarga juga bisa menjadi kelompok yang paling menganut budaya patriarki. Dalam keluarga, laki-laki selalu menjadi pemimpin dan dianggap lebih kuat dan berkuasa dibandingkan perempuan.

b. Agama

Hampir semua agama dan keyakinan menganggap bahwa laki-laki memiliki kekuasaan tertinggi.

c. Sistem Ekonomi dan Lembaga-lembaga Ekonomi

Kelompok ini kurang lebih mirip dengan kelompok keluarga, dimana pada kelompok yang menganut budaya patriarki, laki-laki cenderung bertanggung jawab dalam segala hal, termasuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengatur keuangan. Pekerjaan rumah tangga, meskipun produktif, sering kali dianggap tidak penting dan tidak dihargai.

d. Sistem dan Lembaga Politik

Dilihat dari institusi politik di seluruh lapisan masyarakat, hampir semuanya adalah laki-laki. Jumlah perempuan di partai atau organisasi politik tidak banyak..

---

<sup>23</sup> Puspita Rani Swari, "Budaya Patriarki dan Tantangan Dalam Kebebasan Berepresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf)", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 25, No. 2, Universitas Udayana, 2023, 215

- e. Media: Media dan alat komunikasi sangat penting dalam penyebaran ideologi gender dan kelas. Namun masih banyak tayangan yang menyampaikan gambaran dan pesan tentang dominasi laki-laki.

Patriarki dipahami sebagai cara pandang yang menempatkan laki-laki lebih utama diatas perempuan. Dalam disiplin antropologis, dirumuskan bahwa kondisi sosiologis laki-laki dalam masyarakat cenderung menguasai kekuasaan. Semakin laki-laki berkuasa, maka semakin kuat dorongan mereka untuk memegang posisi sebagai superior. Hal ini banyak ditemukan dalam masyarakat terutama dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

Dari paparan tersebut, didukung oleh beberapa teori dari pendapat ahli yang relevan, salah satunya Alfian Rokhmansyah, patriarki didefinisikan sebagai struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segalanya. Laki-laki memegang peran utama dalam masyarakat, sedangkan perempuan tidak memiliki pengaruh atau hak untuk bertanggung jawab dalam wilayah umum. Patriarki didefinisikan sebagai distribusi kekuasaan antara laki-laki yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan perempuan dalam berbagai hal. Sylvia Walby mengatakan bahwa patriarki adalah sistem struktur sosial dan praktik di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Sebaliknya, Bessler mengatakan bahwa patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama di dalam

---

<sup>24</sup> Mochamad Nadif Nasruloh, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)", Jurnal YUDISIA, Vol. 13, No. 1, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022, 41

organisasi sosial. Rueda menyatakan bahwa salah satu alasan penindasan terhadap perempuan adalah patriarki.<sup>25</sup>

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut adalah patriarki dipahami sebagai sistem sosial yang menempatkan posisi laki-laki berada diatas dari perempuan. Artinya laki-laki lebih diprioritaskan dari pada perempuan dalam berbagai hal aspek kehidupan. Perempuan dianggap posisinya lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini ditunjukkan dari bagaimana seorang laki-laki dalam keluarga yang memiliki kekuasaan terhadap istri dan anaknya.

Dalam penelitian ini, patriarki yang berlaku di Desa Pasarenan adalah aspek pendidikan bagi perempuan. Secara fakta yang diperoleh dari data lapangan berupa wawancara, terlihat bahwa perempuan tidak memiliki kebebasan dalam menyengam pendidikan dibandingkan laki-laki yang lebih diprioritaskan.

## **2. Akses Pendidikan Perempuan Di Desa Pasarenan Kecamatan Kadungdung Kabupaten Sampang**

Akses perempuan dalam pendidikan tidak diprioritaskan. Keluarga lebih mengutamakan pendidikan tinggi untuk anak laki-laki dibandingkan perempuan. Perempuan dianggap memiliki beban domestik yang lebih besar sehingga pendidikannya dikesampingkan. Perempuan dianggap kodratnya bukan sebagai pencari nafkah sehingga pendidikannya tidak diutamakan.

Hal ini berhubungan dengan observasi yang peneliti lakukan. Observasi yang peneliti temukan di desa Pasarenan adalah sebagian besar perempuan yang menjadi ibu rumah tangga. Peneliti mengamati bahwa perempuan tersebut tergolong ada pada usia muda atau belum mencapai batas umur yang dianjurkan

---

<sup>25</sup> Putri Sanggita Padmayani, "Implikasi Budaya Patriarki Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang)", 18

pada usia matang untuk menikah. Hal ini didasarkan pada beberapa pertanyaan singkat yang peneliti ajukan mengenai pendidikan terakhir sebagian besar perempuan di Desa Pasarenan yang rata-rata pendidikan terakhirnya adalah SMP atau Mts sederajat meskipun ada beberapa sebagian yang pendidikan terakhirnya SD atau SMA. Selain itu, peneliti mengamati bagaimana keseharian sebuah rumah tangga, dimana di rumah perempuan fokus pada urusan domestik atau pekerjaan rumah dan mengurus anak serta suami dengan berbagai kebutuhannya, sedangkan laki-laki tidak ditemukan di rumah atau bekerja. Artinya secara kebiasaan perempuan memiliki beban domestik sedangkan laki-laki bekerja. Dalam hal ini, perempuan berada pada posisi sebagai istri atau ibu rumah tangga. Sehingga fenomena ini membuktikan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan yang berasal dari budaya pernikahan dini.

Keterbatasan akses perempuan dalam pendidikan didasari oleh anggapan perempuan tugasnya hanya reproduktif yaitu melahirkan atau mengurusnya dan urusan domestik atau rumah tangga. Perempuan dianggap lemah, terbatas, eksploitatif secara emosional, dan tidak logis, sehingga tidak layak untuk menduduki jabatan publik. Ketika seorang perempuan menjadi pegawai negeri, masyarakat patriarki memandangnya sebagai pelanggar sifat kewanitaannya.<sup>26</sup>

Berbagai bentuk patriarki di Desa Pasarenan didukung oleh berbagai penelitian yang menyatakan adanya patriarki terutama dalam aspek pendidikan. Jurnal yang ditulis oleh Nursaptini, Muhammad Sobri, Deni Sutisna, Muhammad Syazali dan Arif Widodo berjudul *Budaya Patriarki Dan Akses Perempuan Dalam Pendidikan*.<sup>27</sup> Penelitiannya menunjukkan bahwa budaya patriarki yang mengakar

---

<sup>26</sup> Luthfia Rahma Haliza dan Ergina Faralita, "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender", 20

<sup>27</sup> Nursaptini, "Budaya Patriarki dan Akses Perempuan Dalam Pendidikan", 16

dalam masyarakat meyakini bahwa anak laki-laki harus menerima sebagian besar pendidikan, dan bahwa masalah budaya dalam masyarakat menghambat akses perempuan terhadap pendidikan. Keadaan ini terlihat dari data angka melek huruf perempuan sebesar 83,42% dibandingkan laki-laki sebesar 91,86%. Data ini juga didukung oleh Indeks Pembangunan Manusia laki-laki (75,43 vs 68,63).

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Dodhly Hyronimus Ama Loggy berjudul *Budaya Patriarki Dan Pendidikan Anak Perempuan (Studi Pada Budaya Lamaholot Di Waipukang Nusa Tenggara Timur)*.<sup>28</sup> Penelitian menemukan bahwa budaya Lamaholot berpengaruh terhadap pendidikan anak laki-laki dan perempuan di Waipukang, Nusa Tenggara Timur. Budaya ini menciptakan perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Misalnya anak laki-laki diutamakan karena merupakan anak suku atau ahli waris suku, namun anak perempuan diutamakan karena orang tuanya tidak mempunyai hak untuk bertahan hidup setelah menikah, sehingga orang tua merasa dirugikan jika menyekolahkan anak perempuan..

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa akses perempuan dalam pendidikan di Desa Pasarenan masih terbatas. Mengingat persepsi masyarakat tentang perempuan dan kaitannya dengan patriarki. Perempuan dipersepsikan sebagai makhluk yang lemah, berperasaan, tidak logis, dan sebagainya sehingga tidak diprioritaskan untuk mengenyam pendidikan tinggi dibandingkan laki-laki yang lebih logis atau rasional. Sehingga dalam lingkungan keluarga, orang tua lebih mengedepankan laki-laki. perempuan juga dipersepsikan

---

<sup>28</sup> Dodhly Hyronimus Ama Loggy, "Budaya Patriarki Dan Pendidikan Anak Perempuan (Studi Pada Budaya Lamaholot Di Waipukang Nusa Tenggara Timur)", Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, vii

sebagai makhluk yang diciptakan untuk fokus pada urusan domestik sesuai kodratnya seperti melahirkan, menyusui, merawat anak, melayani suami dan urusan rumah tangga.

Fenomena tersebut telah dikaji secara ilmiah oleh beberapa peneliti. Salah satunya menyatakan jumlah yang melek huruf lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan penelitian lainnya menyatakan bahwa pendidikan lebih diutamakan laki-laki karena adanya bias gender yang membatasi perempuan untuk berada di ranah publik terutama pendidikan. Sehingga jelas dari berbagai penelitian dan fenomena yang terjadi di Desa Pasarenan menggambarkan bagaimana perempuan dan pendidikan. Gambaran tersebut berupa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dan pendidikan bahwa perempuan tidak begitu memiliki banyak andil dalam pendidikan dan ranah publik.

Di desa Pasarenan, perempuan dianggap tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi. Cukup memiliki pendidikan hingga usia menikah, biasanya SMP atau MTS. Kodrat perempuan hanya melahirkan, menyusui, merawat anak, dan melayani suami.

Menurut Nasir & Lilianti, kesenjangan dalam mengenyam Pendidikan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh budaya patriarki yang kuat. Mereka berkumpul tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari seluruh dunia. Para pendukung budaya patriarki menganggap laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan dalam segala hal.<sup>29</sup>

Dalam budaya patriarki, perempuan dianggap lemah, eksploitatif secara emosional, dan tidak logis. Oleh karena itu, dianggap tidak pantas jika dilakukan

---

<sup>29</sup> Nursaptini, "Budaya Patriarki dan Akses Perempuan Dalam Pendidikan", 17

di tempat umum. Budaya populer yang merupakan budaya patriarki ini tidak hanya berakhir di lingkungan keluarga dan rumah tangga saja, namun juga menjadi budaya masyarakat dan budaya bangsa. Oleh karena itu, diyakini bahwa segala permasalahan yang dihadapi perempuan diselesaikan oleh ayah, suami, atau laki-laki.<sup>30</sup>

Pembatasan pendidikan bagi perempuan merupakan Budaya turun temurun yaitu Perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi dan dinikahkan setelah baligh. Orang tua menikahkan anak perempuan ketika usia baligh atau remaja. Takut anak perempuan tidak laku jika tidak menikah dini. Mayoritas perempuan tidak mencapai jenjang strata atau sarjana. Pendidikan minimal adalah lulusan SD atau SMP. Perempuan dinikahkan setelah lulus sekolah. Pria lebih banyak berpendidikan tinggi dibandingkan perempuan. Faktor terbesar yang menghambat perempuan dalam mengakses pendidikan di Desa Pasarenan adalah pola pikir masyarakat yaitu Perempuan kodratnya fokus pada urusan rumah tangga. Perempuan dinikahkan secara dini karena takut tidak laku.

Dari pengertian budaya menurut KBBI adalah sebagai pikiran, adat istiadat, dan sesuatu yang sudah berkembang dan menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Ini menegaskan bahwa budaya mencakup aspek mental (pikiran), tradisional (adat istiadat), dan kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Jika diaitkan dengan fenomena yang terjadi di Desa Pasarenan merupakan budaya yang melestarikan pernikahan dini, karena hal ini sudah turun temurun dilestarikan. Sehingga pernikahan dini menggambarkan bahwa akses perempuan terhadap pendidikan telah berakhir atau terbatas.

---

<sup>30</sup> Lusya Palulungan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020), 4

Dari pernyataan tersebut, menyatakan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk berpendidikan tinggi, begitu mencapai usia baligh atau usia lulus sekolah wajib 9 tahun yaitu lulus SMP atau Mts langsung dinikahkan. Sehingga tidak lanjut pada pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Sehingga di desa Pasarenan banyak terjadi pernikahan dini. Dari pernyataan narasumber alasan utama menikahkan anak pada usia dini adalah ketakutan akan anak perempuannya tidak laku atau tidak segera menikah. Selain itu, penghambat akses pendidikan untuk perempuan adalah pola pikir masyarakat bahwa perempuan hanya fokus pada kodratnya yaitu urusan rumah tangga.

Konstruksi budaya patriarki dimulai dari lingkungan keluarga. Budaya patriarki yang ada di masyarakat sepertinya hanya itu saja. Hal ini menimbulkan kesan bahwa perempuan pada dasarnya lemah. Selain itu, keluarga yang menganut sistem patriarki memberikan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi bagi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.<sup>31</sup>

Hal ini didukung oleh penelitian akademis Yudhaningram yang menunjukkan bahwa masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya patriarki mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pola pendidikan keluarga yang diterapkan pada anak-anaknya. Orang tua membesarkan anak-anaknya sesuai dengan budaya dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Biasanya anak laki-laki dilatih untuk menjadi calon kepala keluarga, dan anak perempuan dilatih untuk menjadi calon suami (ibu rumah tangga) yang baik.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Nursaptini, "Budaya Patriarki dan Akses Perempuan Dalam Pendidikan", 17

<sup>32</sup> *Ibid.*, 19

Menurut studi Pusat Penelitian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia pada tahun 2015, Indonesia memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi kedua di Asia Tenggara. Menurut Komnas Perempuan, hampir 50% kasus pernikahan dini terjadi di bawah tekanan atau paksaan antara perempuan di bawah 18 tahun dan laki-laki di atas 30 tahun. Pernikahan dini dipengaruhi oleh struktur sosial yang dibentuk masyarakat, seperti budaya patriarki dan anggapan bahwa perempuan mencari nafkah dengan bekerja hanya di dalam rumah tangga.. Kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga dan cenderung tidak produktif sama sekali. Pekerjaan mereka hanya mencuci, memasak, bersih-bersih dan membersihkan rumah. Dalam beberapa tradisi, perempuan tidak mempunyai kebebasan untuk menolak karena perempuan yang menolak menikah adalah perempuan kejam yang tidak mengenal dirinya sendiri. Terlepas dari kenyataan sosial bahwa banyak dari mereka yang belum siap menikah, sayangnya fakta tersebut masih diabaikan.<sup>33</sup>

Sedangkan alasan lain menurut Narwoko, J. Dwi & Suyanto, Masyarakat didominasi oleh gagasan bahwa perempuan tidak perlu melanjutkan ke sekolah menengah atas dan akhirnya akan bekerja di dapur. Bahkan dalam keluarga dengan sumber daya keuangan terbatas, mendidik anak laki-laki akan menjadi prioritas. Orang tua biasanya ingin anak laki-lakinya melanjutkan pendidikan tinggi dan anak perempuannya tinggal di rumah. Hal ini membuat anak perempuan sulit mendapatkan pendidikan. Di sisi lain, Pak Arjani mengatakan: Pada dasarnya, terdapat faktor budaya yang menghalangi individu dalam suatu keluarga atau komunitas untuk menggunakan haknya secara setara sebagai

---

<sup>33</sup> Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Sitti A, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia", 74

anggota keluarga, anggota komunitas, atau warga negara. Salah satu hambatan budaya adalah adanya hubungan yang timpang dan timpang antara laki-laki dan perempuan akibat budaya yang sangat patriarki. Situasi ini terlihat jelas di masyarakat, terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan, bisnis, dan sumber daya lainnya masih sangat terlihat hingga saat ini.<sup>34</sup>

Padahal, pernikahan dini diatur dalam UU No. Pasal 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia sah untuk menikah adalah 18 tahun ke atas. Faktanya, undang-undang tersebut menegaskan dalam Pasal 26(1)(c) bahwa salah satu tugas orang tua adalah mencegah pernikahan anak. Hal ini didasarkan pada mempertimbangkan aspek kesiapan psikologis, kesehatan, spiritual dan finansial. UU Perlindungan Anak tidak didukung dengan keberadaan UU No. Pasal 1 UU Perkawinan tahun 1974 sudah ada jauh sebelum itu, dan UU Perkawinan menetapkan batasan usia menikah 16 tahun bagi perempuan. Undang-Undang Perkawinan bahkan memberikan kemungkinan bagi anak yang menikah di bawah usia 16 tahun untuk mengajukan surat nikah. Bahkan, hakim inkuisisi biasanya mengabulkan permohonan surat nikah dengan alasan menghindari perzinahan. Situasi ini semakin diperparah dengan belum adanya ketentuan yang lebih jelas mengenai batasan pemberian pengecualian kepada hakim pengadilan agama dalam memproses dan memutus permohonan pengecualian. Oleh karena itu, hakim Inkuisisi sebagai otoritas yang memberikan pengecualian tidak memiliki pedoman mengenai batasan usia pengecualian, persyaratan permohonan,

---

<sup>34</sup> Nursaptini, "Budaya Patriarki dan Akses Perempuan Dalam Pendidikan", 19

pertimbangan dalam pemberian pengecualian, dan bukti permohonan pengecualian.<sup>35</sup>

Dari data tersebut, maka tidak dipungkiri bahwa pernikahan dini masih banyak terjadi. Berbagai faktor menjadi penyebab terlestarnya budaya pernikahan dini. Hal ini menjadi pendukung bahwa di Desa Pasarenan masih banyak terjadi pernikahan dini. Dampaknya banyak perempuan yang ahrus putus sekolah karena dinikahkan. Berbagai alasan mereka tetap melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini tidak akan terputus dari budaya patriarki dimana perempuan dipandang lebih rendah dari laki-laki. Selain dari faktor budaya, pernikahan dini sering terjadi karena adanya dispensasi dari Hakim Pengadilan Agama mengenai batas minimal usia pengantin dengan alasan menghindari zina. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab banyak terjadinya pernikahan dini. Walaupun terdapat UU yang mengatur pernikahan dini dilarang dan adanya batasan usia yang seharusnya diperhatikan namun diabaikan.

### **3. Upaya Dalam Mengatasi Fenomena Budaya Patriarki**

Upaya yang dilakukan untuk membuka jalan bagi perempuan di desa Pasarenan yaitu dengan melaksanakan penyuluhan melalui seminar kepada masyarakat, terutama perempuan, tentang pendidikan. Keberhasilan upaya tersebut tidak efektif untuk mengubah fenomena tersebut karena kentalnya budaya patriarki di masyarakat. Hal ini juga terlihat dari respon masyarakat yaitu komentar tentang pendidikan tidak terlalu penting untuk perempuan. Perempuan cukup di rumah fokus pada urusan anak dan suami serta keluarga. Karena anak perempuan adalah tanggung jawab orang tuanya.

---

<sup>35</sup> Lusiana Palulungan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, 24

Untuk mengupayakan peran perempuan dalam akses pendidikan, salah satu upayanya adalah dengan memperbaiki pemahaman tentang kesetaraan gender. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan prasyarat penting untuk membangun tatanan sosial yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, diperlukan peran laki-laki dan perempuan untuk mengubah struktur masyarakat yang patriarki. Salah satu upaya untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan sekaligus dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah melakukan pemberdayaan perempuan dengan pola pendekatan yang memposisikan perempuan sebagai subyek dalam pembangunan, bukan lagi obyek pembangunan.<sup>36</sup>

Pemberdayaan tersebut berupa penyuluhan atau seminar dengan mengajak seluruh masyarakat untuk turut hadir dan memberikan gambaran kepada mereka tentang pentingnya pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa memandang bulu untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk akses ke pendidikan. Tujuan dari penyampaian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dalam sebuah wawancara tentang efektifitas dari upaya tersebut adalah adanya berbagai komentar dari masyarakat bahwa pendidikan tidak terlalu penting untuk perempuan. Perempuan hanya perlu fokus urusan rumah tangga.

Pola pikir tersebut sangat erat kaitannya dengan patriarki. Dalam sistem patriarki, laki-laki mendominasi kepemimpinan politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan peran properti. Dominasi budaya patriarki yang sudah mengakar kuat di masyarakat, berkontribusi besar terhadap marginalisasi status dan peran

---

<sup>36</sup> Luthfia Rahma Haliza dan Ergina Faralita, "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender", 24

perempuan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan sebagai korban. Paradigma patriarki akan membentuk pemikiran masyarakat, pelaku ekonomi, intelektual, dan pengambil keputusan politik ketika berhadapan dengan perempuan, dan pada akhirnya membentuk budaya. Budaya patriarki ini menyebabkan perempuan menjadi kelompok marginal dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. Terbentuknya budaya ini bermula dari norma-norma yang diberlakukan di masyarakat melalui berbagai proses yang panjang. Dalam budaya patriarki, superioritas laki-laki dan perempuan hanya ditekankan pada ranah domestik, dan pekerjaan perempuan disamakan dengan konsep dapur (memasak) (mencuci pakaian) dan kasur (berternak dan melahirkan).<sup>37</sup> Masyarakat yang menganut sistem budaya patriarki menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibanding perempuan. Laki-laki dianggap mempunyai kekuasaan dan kekuatan lebih tinggi dibanding perempuan, dan masyarakat beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.<sup>38</sup>

Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan peran yang berbeda. Laki-laki lebih unggul dari perempuan karena lebih kuat secara fisik, mental, dan intelektual. Laki-laki bekerja di sektor publik, namun perempuan dilarang tinggal di rumah. Budaya patriarki terus berkembang di masyarakat. Kebudayaan ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan dimensi, antara lain ekonomi, pendidikan, politik, dan hukum. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang menghambat perempuan dan melanggar hak-haknya. Penyebabnya masih menjadi

---

<sup>37</sup> Luthfia Rahma Haliza dan Ergina Faralita, "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender", 22

<sup>38</sup> Putri Sanggita Padmayani, "Implikasi Budaya Patriarki Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang)", 19

perdebatan lama, yaitu kepercayaan bahwa profesi perempuan terlalu domestik. Sebagian orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan tidak setara. Kelompok ini biasanya berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara biologis, yang dipandang sebagai penyebab perbedaan perilaku dan peran perempuan dan laki-laki pada tingkat budaya, sosial, dan politik. Faktanya, permasalahannya terletak pada pemahaman yang salah mengenai seks dan gender. Orang-orang konservatif percaya bahwa gender dan gender itu berbeda tetapi wajar.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan bahwa budaya patriarki di masyarakat masih kuat dan memarginalkan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa perempuan hanya perlu fokus pada urusan rumah tangga dan tidak setara dengan laki-laki. Akibatnya, perempuan mengalami keterbatasan akses dan kesempatan dalam pendidikan, serta hak-hak yang mereka dilanggar. Hal ini berkaitan dengan pola pikir atau paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa Wanita tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Paradigma tersebut telah melekat bahkan sampai saat ini pun masih banyak terjadi. Hal ini terbukti dari pernyataan dalam wawancara kepada Kepala Desa yang menyatakan bahwa efektifitas tidaknya sebuah upaya dalam mengedukasi masyarakat semua kembali kepada keyakinan yang mereka anut termasuk budaya patriarki. Sehingga efektifitas upaya tersebut tidak relatif bergantung bagaimana mereka memahami yang telah mereka dapatkan.

---

<sup>39</sup> Mochamad Nadif Nasruloh, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)", 150

